



**PEMENUHAN PERSENTASE SAHAM OLEH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI PT BANK NAGARI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Hukum

Oleh:

DIVA DEZI PUTRI

NIM. 2120112045

Pembimbing:

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**PEMENUHAN PERSENTASE SAHAM OLEH PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT
BANK NAGARI**

**(Diva Dezi Putri, 2120112045, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 111 Halaman, 2024)**

ABSTRAK

Identitas PT Bank Nagari sebagai salah satu BUMD dengan bentuk Perseroda di Provinsi Sumatera Barat sangat menarik untuk dikaji. Berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa salah satu persyaratan BUMD dengan bentuk Perseroda adalah terdapatnya kepemilikan saham oleh salah satu daerah pemegang saham dengan minimal persentase di angka 51% (lima puluh satu persen). Hingga tanggal 31 Desember 2023, persentase kepemilikan saham tertinggi di PT Bank Nagari dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebanyak 32,51% (tiga puluh dua koma lima puluh satu persen). Persentase saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku Pemegang Saham Tertinggi sekaligus Pemegang Saham Pengendali tersebut masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk status PT Bank Nagari sebagai BUMD yang berbentuk Perseroda. Perbedaan praktik yang terjadi di PT Bank Nagari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan kajian penelitian karena telah terjadinya perselisihan *das sein* dan *das sollen*. Penelitian ini membahas terkait *pertama* upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham pengendali untuk memenuhi syarat persentase kepemilikan saham pada PT Bank Nagari sebagai Perusahaan Perseroan Daerah. *Kedua*, konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham pengendali pada PT Bank Nagari sebagai Perusahaan Perseroan Daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan masalah Yuridis-Normatif yang didukung data empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi persentase kepemilikan saham di PT Bank Nagari dengan cara melakukan penambahan modal tidak dilaksanakan dengan maksimal terbukti dengan kenyataan bahwa kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT Bank Nagari masih di angka 32,51% (tiga puluh dua koma lima puluh satu persen). Selain itu, konsekuensi dari tidak terpenuhinya kepemilikan saham tersebut tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun. Namun, meski tidak terdapat konsekuensi yang tegas, status PT Bank Nagari sebagai BUMD yang berbentuk Perseroda tidak memperoleh kepastian hukum.

Kata Kunci: Persentase Saham, Pemegang Saham Pengendali, Perseroda.

FULFILLMENT OF THE PERCENTAGE OF SHARES BY THE WEST SUMATRA PROVINCIAL GOVERNMENT AS THE CONTROLLING SHAREHOLDER OF PT BANK NAGARI

(Diva Dezi Putri, 2120112045, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 111 Pages, 2024)

ABSTRACT

The identity of PT Bank Nagari as one of the BUMDs in the form of Perseroda in West Sumatra Province is very interesting to study. Based on Article 339 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government jo Article 5 paragraph (1) of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regionally Owned Enterprises states that one of the requirements for BUMD in the form of Perseroda is the existence of share ownership by one of the shareholder regions with a minimum percentage of 51% (fiftyone percent). As of December 31, 2023, the highest percentage of share ownership in PT Bank Nagari is owned by the West Sumatra Provincial Government, which is 32.51% (thirtytwo point fiftyone percent). The percentage of shares owned by the West Sumatra Provincial Government as the Highest Shareholder as well as the Controlling Shareholder still does not meet the provisions of the laws and regulations that make the status of PT Bank Nagari as a BUMD in the form of Perseroda. The difference in practice that occurs at PT Bank Nagari with the provisions of the laws and regulations needs to be studied because there has been a dispute between *das sein* and *das sollen*. This study discusses the first related to the efforts made by the Regional Government of West Sumatra Province as the controlling shareholder to meet the requirements for the percentage of share ownership in PT Bank Nagari as a Regional Company. Second, the legal consequences if the percentage of share ownership is not fulfilled by the Regional Government of West Sumatra Province as the controlling shareholder in PT Bank Nagari as a Regional Company. The research method uses a Juridical-Normative problem approach, which is supported by empirical data. The conclusion of this study is that the efforts made by the West Sumatra Provincial Government to meet the percentage of share ownership in PT Bank Nagari by increasing capital are not implemented optimally, as evidenced by the fact that the West Sumatra Provincial Government's share ownership in PT Bank Nagari is still at 32.51% (thirtytwo point fifty one percent). In addition, the consequences of the unfulfilled share ownership are not regulated by any laws and regulations. However, even though there are no firm consequences, the status of PT Bank Nagari as a state-owned company in the form of Perseroda does not obtain legal certainty.

Keywords: Percentage of Shares, Regional Company Companies, Perseroda.